

**PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

(Studi diDesa Banjarejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

MAKSIMILIANUS HANI MUSDI

NIM : 2015210148

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2019**

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebuah aturan ataupun kebijakan pemerintah pusat dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan kemudian kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2018, penelitian menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. informan penelitian ini yakni kepala desa, BPD dan Masyarakat desa. pengambilan sampel menggunakan *natural setting*, keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, Namun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Maka hasilnya menunjukkan pada kriteria baik hal ini diperlihatkan dengan hasil jawaban responden yakni mulai dari Sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat, dukungan aparatur desa dalam implementasi kebijakan, anggaran yang di alokasikan dalam pembangunan,serta fasilitas pendukung dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep dasar pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka salah satu tugas utama pemerintah yakni mensejahterakan masyarakat. Jadi ketika kita mendefinisikan tentang desa, maka desa adalah sebuah pemerintahan yang paling dibawah yakni dibawah pemerintahan daerah yang merupakan wilayah dengan batas administrasi dan didalamnya terdapat nilai nilai itu pun norma yang mengikat seluruh masyarakatnya sesuai dengan kebiasaannya. Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Desa adalah desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan juga mengurus urusan masyarakat berdasarkan kebutuhannya.

Penjelasan diatas telah tercantum dalam aturan desa maka pemerinta mengeluarkan kebijakan sesuai dengan tututan ataupun kebutuhan masyarakatnya. maka undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang bagaimana Kewenangan pemerintah desa dalam menyatukan dan juga sekaligus mengurus urusan masyarakat didasarkan pada hukum adat yang ada pada wilaya administrasinya yakni masyarakat desa. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahanya, desa juga harus menyadari betul akan kewajiban yang diembanya sehingga mampu mengatur mengakomodir segala urusan masyarakat berdasaryarkan kebiasaan masyarakat sehingga kebijakan desa sejalan dengan kebiasaan masyarakatnya.

Dan pasal 18 juga diatur kewenangan desa. Mencakup kewenangan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi hingga sampai pada pemerintah daerah yang kemudian di eksekusikan oleh pemerintah desa melalui kebijakan yang pro dengan masyarakatnya. Jadi kolerasi antara pemerintah pusat

hingga pada pemerintah desa itu sangat diharapkan oleh masyarakat secara umum melalui kebijakan dan juga tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Jadi keterlibatan pemerintah daerah disini sangatlah diharapkan oleh desa untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan desa Berdasarkan uraian singkat diatas, maka pelaksanaan pembangunan diDesa Banjarejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dilaksanakan dengan baik yakni melibatkan seluruh masyarakat desa dalam menjalankan pembangunan didesa Oleh karena itu berdasarkan pejelasan sebelumnya, maka penulis bergerak hati untuk meneliti terkait Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diDesa Banjarejo

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah:

1. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan diDesa Banjarejo?
2. faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan diDesa Banjarejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penting dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan diDesa Banjarejo
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan diDesa Banjarejo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui peran pemerintah dalam pembangunan desa
- b. Sebagai sumbangsi referensi bagi peneliti berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. memberikan manfaat dan kontribusi nyata untuk pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses pembangunan di desa Banjarejo.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsi pemikiran guna untuk meningkatkan pembangunan di Desa Banjarejo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No. 2/Tahun XIII/25

Andi Supangat. (2010). Statistik Dalam Kajian Deskriptif, *Inferensi*, dan *Non parametrik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hanif Nurcholis, (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit Erlangga

Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto (2011). Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Levinso dan Soekanto (2009:213) Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta. Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto (2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Partisipatif Kebijakan. Bandung. Alfabeta Bandung

Rivai, Veithzal, (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2011).

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, (2010).

Subandi (2011). Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta

Sukardi. (2010). Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Menurut Sukardi (2011) Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Sumaryadi, I Nyoman, (2010), Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Jurnal:

- Khayrul Fiker 2013 Studi Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lodaya Kecamatan Randuagung Kabupaten Pemalang. Journal article Ilmu Pemerintahan Undip <https://media.neliti.com/media/publications/103672-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-meningkatkan.pdf>
- Rizky A. Prasajo, Luluk Fauziah 2015 Peran Pemerintah Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo jurnal politik <https://www.researchgate.net/publication/309743051>
- Steffy Adelia Tind 2015 Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Jurnal Politico, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/11943/11532>
- Steffy Adelia Tindi 2015 Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Jurnal Politico [H ttps://Www.Researchgate.Net/Publication/318978501](https://www.researchgate.net/publication/318978501)
- Vicayani 2017 Peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar_Skripsi http://repository.radentan.ac.id/1239/1/Skripsi_Ficayani.pdf